

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifiyanto, Muhammad Naufal. *Anotasi Pemikiran Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.
- Cahyono, Bangkit. "Asas Pemungutan Pajak dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa," t.t.
- Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosiologi; Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Darmodiharjo, Darji. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- . *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Devano, Sony, dan Siti Kurnia. *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2006.
- Due, John F, dan Ann Friedlaender. *Keuangan Negara Perekonomian Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Fajrin, Aulia. "Proporsionalitas Prinsip Keadilan Pengenaan Denda Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Pajak." Universitas Hasanudin, 2024.
- Ilyas, Wirawan B., dan Richard Burton. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Ismail, Tjip. *Badan Peradilan Pajak*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.
- . *Fungsi dan Syarat Pemungutan Pajak* . Jakarta: Modul Universitas Terbuka , 2011.
- . *Hak dan Kewajiban Wajib Pajak* . Jakarta: Universitas Terbuka , 2011.
- . *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* . Jakarta: Universitas Terbuka , 2011.
- . *Kualifikasi Acara Persidangan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2021.
- . *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.
- . *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)*. Universitas Terbuka, 2011.
- . *Penerbitan dan Penagihan Pajak*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.

- . *Pengertian Pajak Dalam Postur APBN*. Jakarta: Modul Universitas Terbuka, 2011.
- . *Upaya Hukum Sengketa Pajak*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2011.
- Komariah, Ruki, dan Ali Purwito M. *Pengadilan Pajak Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean, dan Cukai*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Ketertiban yang Adil (Problematisa Filsafat Hukum)*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
- Maharani, Vanya. “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Meringankan Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/pid/2023.” UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Moedjono. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit FKIS-IKIP, 1994.
- Mulyani, Maulidia. “Kemanfaatan, Keadilan, dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Murtopo, Purno. *Perpajakan Pendekatan Sertifikasi A-B-C*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.
- Mustaqiem. *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014.
- Mustofa, Arifin Alli. “Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim pada Perkara Perdata.” IAIN Surakarta, 2017.
- R, Santoso Brotodiharjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco, 1982.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy dalam The Legal Philosophy of Lask, Radbruch and Dabin, ed John H. Wigmore, dkk*. Massachusetts: Harvard University Press, 1950.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Rasjidi, Lili. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ratnapala, Suri. *Jurisprudence*. New York: Cambridge University, 2009.

- Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU PTB." *Jatiswara* 36, no. 3 (2021). <https://nasional.tempo.co/read/777544/sengketa-pemkot-surabaya-dan-pt-gala-berlan>
- Jan, Tjia Siau. "Analisis Kebijakan Dualisme Pembinaan Pengadilan Pajak terhadap Kebebasan Hakim dalam Pemeriksaan dan Memutus Sengketa Pajak." Universitas Indonesia, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.
- Soemitro, Rochmat. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung, 1997.
- . *Dasar-dasar Hukum Pajak Pendapatan*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- . *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco, 1988.
- Sukarji, Untung. *Pajak Pertambahan Nilai*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- . *Pajak Pertambahan Nilai*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sumaryono, E. *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Sutrisno, Deddy. *Hakikat Sengketa Pajak: Karakteristik Pengadilan Pajak; Fungsi Pengadilan Pajak*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Hakikat Sengketa Pajak: Karakteristik Pengadilan Pajak; Fungsi Pengadilan Pajak*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Wacks, Raymond. *Jurisprudence*. London: Blackstone Press Limited, 1995.

Jurnal

- Amin, Muhammad, dan Aris Machmud. "Implementasi dan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak Dan Program Pengungkapan Sukarela" 6, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Anggoro, Damas Dwi, dan Yudha Alief Aprilian. "Deficiency Prinsip Keadilan dalam Implementasi e-Tax Kota Malang Berdasarkan Prinsip Kebijakan Pajak yang Baik." *Jurnal Pajak Indonesia* 3, no. 1 (2019).
- Herman, Lisa Amelia, Aminar Sutra Dewi, dan Mike Kusuma Dewi. "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak yang Dipersepsikan Melalui Faktor Deterrence, Keadilan dan Norma Sosial." *Jurnal Benefita* 4, no. 1 (Februari 2019).

K, Maria Emelia Retno. “Kontradiksi antara Upaya Wajib Pajak Mendapatkan Keadilan dengan Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak.” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 3 (2007).

———. “Kontradiksi antara Upaya Wajib Pajak Mendapatkan Keadilan dengan Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak.” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 3 (2007).

Maheswara, Ravi Hafids. “Prinsip-Prinsip Peradilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak.” *Notaire* 3, no. 3 (28 Oktober 2020): 441. <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22836>.

Minollah. “Telaah Asas Keadilan Dalam Pemungutan Pajak Rokok.” *Jurnal IUS* V, no. 1 (2017).

———. “Telaah Asas Keadilan Dalam Pemungutan Pajak Rokok.” *Jurnal IUS* V, no. 1 (2017).

Nurlindah, dan Rosita A. Sugirman. “Menakar Tujuan Hukum Dibalik Keberpihakan Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 Terhadap Koruptor.” *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019).

———. “Menakar Tujuan Hukum Dibalik Keberpihakan Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 Terhadap Koruptor.” *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019).

Pranoto, dan Ayub Torry Satriyo Kusumo. “Reformasi Birokrasi Perpajakan sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara dari Sektor Pajak.” *Yustisia* 5, no. 2 (2016).

Putri, Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia. “Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.” *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (31 Oktober 2024): 315–26. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>.

Yoserwan. “Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan.” *De Jure* 20, no. 2 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (2021).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (2021).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2021 (2021).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (2002).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (2020).

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,” 2009.

Pengadilan Pajak. Putusan Banding Pengadilan Pajak No.PUT-012524.16/2021/PP/M.IVA Tahun 2024 (2021).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2013 Tentang Tata ara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Pengganti Faktur Pajak (2013). www.djpp.kemenkumham.go.id.

PT Harapanjaya Bumipertiwi. Memori Banding PT Harapanjaya Bumipertiwi Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00637/KEB/WPJ.06/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 tentang Keberatan Atas SKPN PPN No.00150/507/18/023/20 Tanggal 20 Juli 2020 tentang PPN Masa Desember Tahun Pajak 2018 (8 November 2021).